CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

NARASI KRISIS, MOBILISASI, DAN REPRESI: STUDI PERBANDINGAN GERAKAN ARAGALAYA DI SRI LANKA DAN GERAKAN MASYARAKAT INDONESIA

Drafti Khansa Handayani[1], Nikhita Maharani Harsan[2], Aniqotul Ummah[3], Fullah Jumahyah[4]

Email: 2310412004@mahasiswa.upnvj.ac.id[1], 2310412006@mahasiswa.upnvj.ac.id[2], aniqotul.ummah@upnvj.ac.id[3], 25069026@upnvj.ac.id[4]

Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract

This study analyzes the dynamics of the relationship between crisis, mobilization, and repression in two contexts of social movements, namely Aragalaya in Sri Lanka and various community movements in Indonesia. Using qualitative methods and a comparative study approach, this research explores how the extreme economic crisis in Sri Lanka in 2022 triggered nationwide mobilization that succeeded in overthrowing President Gotabaya Rajapaksa, while community movements in Indonesia, despite occurring on a large scale, did not result in significant political change due to strong state repression. Research data was obtained from academic journals, media reports, and national and international human rights documents, then analyzed through process tracing to understand patterns of action and state responses. The results show that the success of Aragalaya was influenced by the depth of the crisis and cross-class solidarity, while the limitations of the movement in Indonesia were related to relative economic stability and strong state control. These findings contribute theoretically to the study of social movements in South Asia and Southeast Asia and offer practical implications for strengthening civil society mobilization strategies.

Keywords: ***Narratives of Crisis, Mobilization, Repression***.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dinamika hubungan antara krisis, mobilisasi, dan represi dalam dua konteks gerakan sosial yaitu Aragalaya di Sri Lanka dan berbagai gerakan masyarakat di Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi komparatif, penelitian ini menelusuri bagaimana krisis ekonomi ekstrem di Sri Lanka pada tahun 2022 memicu mobilisasi rakyat berskala nasional yang berhasil menumbangkan Presiden Gotabaya Rajapaksa, sementara gerakan masyarakat di Indonesia,

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

meskipun terjadi dalam skala besar, tidak menghasilkan perubahan politik signifikan karena kuatnya represi negara. Data penelitian diperoleh dari jurnal akademik, laporan media, serta dokumen HAM nasional dan internasional, kemudian dianalisis melalui proses-tracing untuk memahami pola aksi dan respons negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Aragalaya dipengaruhi oleh kedalaman krisis dan solidaritas lintas kelas, sedangkan keterbatasan gerakan di Indonesia berkaitan dengan stabilitas ekonomi relatif dan kontrol negara yang kuat. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi studi gerakan sosial di Asia Selatan dan Asia Tenggara serta menawarkan implikasi praktis bagi penguatan strategi mobilisasi masyarakat sipil.

Kata kunci: Narasi Krisis, Mobilisasi, Represi

PENDAHULUAN

Seringkali, masyarakat menanggapi krisis ekonomi, politik, dan sosial dengan gerakan sosial. Mobilisasi massa yang mengarah pada konflik dengan negara dapat muncul sebagai akibat dari krisis yang mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam keadaan seperti ini, cara negara memberontak terhadap masyarakat sipil seringkali menentukan apakah gerakan sosial akan berhasil atau justru terhambat (Della Porta, 2020; Tarrow, 2021). Untuk memahami dinamika demokrasi dan kekuasaan negara di berbagai konteks, kita perlu memahami hubungan antara krisis, mobilisasi, dan represi ini (Snow, 2020).

Krisis ekonomi terburuk yang pernah dialami Sri Lanka terjadi pada tahun 2022. Inflasi yang meningkat pesat, ketersediaan bahan bakar yang terbatas, kebutuhan pokok yang tidak terjangkau, dan legitimasi pemerintah yang menurun (Kelegama, 2022; Wijenayake, 2023). Di bawah keadaan ini, Aragalaya Movement muncul, sebuah gerakan rakyat yang melibatkan orang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pekerja, mahasiswa, kelas menengah, hingga kaum profesional. Gerakan ini berhasil menumbangkan Presiden Gotabaya Rajapaksa dan memiliki skala yang luar biasa (Uyangoda, 2023). Aragalaya menunjukkan bagaimana mobilisasi besar-besaran mampu mendorong perubahan politik yang signifikan di tengah-tengah berbagai bentuk represi negara di latar krisis yang ekstrem (Gunasekara, 2023).

Indonesia, berbeda dengan Sri Lanka, tidak mengalami krisis ekonomi sebesar itu dalam sepuluh tahun terakhir. Namun, gerakan masyarakat masih ada, terutama ketika kebijakan pemerintah dianggap merugikan rakyat. Penolakan terhadap Revisi Undang-Undang KPK (2019) dan Undang-Undang Cipta Kerja (2020) adalah beberapa gerakan besar. Mobilisasi masyarakat, yang melibatkan mahasiswa, buruh, dan kelompok sipil lainnya, menunjukkan bahwa potensi perlawanan rakyat masih ada, meskipun tidak ada krisis ekonomi yang mendalam (Aspinall & Berenschot, 2020). Mobilisasi masyarakat di Indonesia, berbeda dengan Aragalaya, seringkali tidak menghasilkan perubahan politik yang signifikan. Salah satu faktor penyebabnya adalah

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kekuatan rencana represi negara melalui aparat keamanan, pembatasan ruang gerak, dan hukuman terhadap aktivis (Power, 2020; Mietzner, 2021; Amnesty International, 2022).

Narasi perbandingan ini menarik karena menunjukkan bahwa krisis, mobilisasi, dan represi berkontribusi satu sama lain, bukan satu-satunya. Krisis di Sri Lanka menjadi katalis utama bagi gerakan rakyat secara nasional yang akhirnya menumbangkan rezim (Uyangoda, 2023). Di Indonesia, mobilisasi rakyat yang signifikan terus terjadi, tetapi represi pemerintah menjadi faktor utama yang menghambat gerakan (Mietzner, 2021; Amnesty International, 2022). Oleh karena itu, penting untuk mempelajari cara-cara berbeda di mana narasi krisis, mobilisasi, dan represi dibentuk dalam dua konteks ini.

Dari uraian tersebut, Penelitian ini sangat penting karena kita perlu memahami apa yang membedakan hasil gerakan sosial di Indonesia dan Sri Lanka. Studi ini memberikan kontribusi dalam penelitian gerakan sosial melalui pendekatan perbandingan lintas negara (Tarrow, 2021). Secara praktis, penelitian ini dapat memberi masyarakat sipil Indonesia pemahaman tentang cara yang lebih baik untuk membuat strategi mobilisasi untuk memerangi represi negara (Della Porta, 2020). Selain itu, itu juga dapat membuka diskusi tentang kualitas demokrasi di Asia Selatan dan Asia Tenggara (Aspinall & Berenschot, 2020; Uyangoda, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi komparatif untuk memahami proses, dinamika, dan makna kemunculan gerakan sosial dalam konteks krisis ekonomi dan politik.[11] Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah taktik mobilisasi, narasi krisis, dan pola represi negara dengan membandingkan Gerakan Aragalaya di Sri Lanka dan gerakan masyarakat di Indonesia. Data penelitian diperoleh dari jurnal akademik, laporan media, serta dokumen hak asasi manusia nasional dan internasional, termasuk laporan mengenai konstruksi narasi krisis di Sri Lanka dan Indonesia, serta pola mobilisasi dan solidaritas lintas kelas dalam Aragalaya (Daratullaila et al., 2025). Dokumen HAM seperti laporan FIDH dan Amnesty International digunakan untuk memahami bentuk represi negara, sementara seluruh data diseleksi dari lima tahun terakhir dan ditriangulasi untuk menjaga akurasi.

Analisis dilakukan menggunakan teknik process-tracing untuk menelusuri hubungan antara krisis, mobilisasi, dan respon negara, terutama pada kasus Sri Lanka tahun 2022 yang menunjukkan kegagalan tata kelola dalam menghadapi tekanan ekonomi global (Ginting et al., 2023). Gerakan Aragalaya muncul sebagai bentuk kesadaran kolektif yang diorganisir secara horizontal melalui media sosial, menjadi simbol demokrasi partisipatif dan solidaritas masyarakat (Daratullaila et al., 2025). Pemerintah Sri Lanka merespons dengan represi, namun tekanan publik yang meningkat menyebabkan runtuhnya legitimasi dan pengunduran diri presiden, menunjukkan dinamika krisis yang menghubungkan aspek ekonomi, sosial, dan politik [Ridwan et al., 2025]. Narasi krisis ini memperlihatkan bagaimana solidaritas masyarakat dapat menjadi kekuatan moral dan politik untuk menekan rezim yang tidak responsif.

[1] Ginting, A. P. B., Deliana, E., & Diana, L. (2023). Peran Organisasi Moneter Internasional dalam Pemulihan Ekonomi Sri Lanka Perspektif Hukum Ekonomi Internasional. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(16), 67–75.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Narasi Krisis

Narasi krisis dipahami sebagai konstruksi sosial yang memengaruhi bagaimana masyarakat menafsirkan penyebab dan dampak sebuah peristiwa, bukan sekadar kondisi material yang terjadi begitu saja (Swartz, 2021). Dalam kasus Sri Lanka, krisis ekonomi 2021–2022 dipersepsikan publik sebagai hasil dari kegagalan pemerintahan, korupsi, dan keputusan politik yang buruk, bukan sekadar persoalan ekonomi global (Gunasekara, 2022). Media turut memperkuat pandangan bahwa krisis tersebut merupakan krisis "buatan manusia", sehingga masyarakat melihatnya sebagai bukti kegagalan struktural yang menuntut perubahan politik (Kelegama & Perera, 2023). Hal ini melahirkan Gerakan Aragalaya, sebuah mobilisasi lintas kelas yang menuntut pertanggungjawaban moral dan politik pemerintah. Narasi krisis yang kuat ini menyatukan publik dan membentuk solidaritas horizontal yang memosisikan pemerintah sebagai aktor utama penyebab krisis, sehingga tuntutan tidak lagi bersifat ekonomi semata tetapi juga menyasar reformasi sistem kekuasaan.

Sementara itu, di Indonesia, narasi krisis dibentuk oleh sejarah politik yang panjang, terutama memori krisis 1998 yang mengaitkan kegagalan ekonomi dengan tuntutan demokratisasi (Aspinall, 2020). Ketika pandemi COVID-19 muncul, narasi krisis kembali muncul sebagai kritik terhadap respons negara dan ketidakkonsistenan kebijakan, sehingga memicu perdebatan tentang legitimasi pemerintah (Hadiz, 2022). Tidak seperti Sri Lanka yang menghasilkan mobilisasi tunggal yang masif, narasi krisis di Indonesia cenderung menghasilkan gerakan yang lebih tersebar, bergantung pada konteks dan isu, namun tetap membawa sentimen anti-otoritarianisme dan kritik terhadap kapasitas negara. Perbedaan konstruksi narasi ini menjelaskan mengapa mobilisasi di Sri Lanka bersifat spontan dan menyatu, sedangkan di Indonesia lebih tersegmentasi dan terbentuk melalui jaringan mahasiswa, buruh, serta masyarakat sipil. Dengan demikian, cara sebuah krisis diceritakan dan dipahami berpengaruh besar terhadap pola mobilisasi sosial serta arah tuntutan politik yang muncul.

B. Pola Mobilisiasi Massa

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Mobilisasi massa dalam gerakan sosial dipengaruhi oleh struktur peluang politik, kekuatan organisasi, dan kemampuan membangun identitas kolektif yang menyatukan berbagai kelompok sosial (Tarrow, 2021). Dalam konteks Sri Lanka, mobilisasi Aragalaya muncul sebagai respons spontan terhadap krisis ekonomi yang akut dan berhasil menyatukan mahasiswa, pekerja, profesional, serta kelompok masyarakat bawah ke dalam gerakan lintas kelas (Gunasekara, 2022). Media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter memperkuat mobilisasi melalui penyebaran pesan, koordinasi aksi, serta pembentukan solidaritas horizontal yang mempercepat konsolidasi gerakan (Fernando, 2024). Pemanfaatan ruang publik seperti Galle Face Green menunjukkan bahwa koordinasi informal berbasis komunitas digital dapat menghasilkan kekuatan politik yang signifikan meski tanpa organisasi formal, terutama ketika legitimasi pemerintah runtuh (Perera & Samarasinghe, 2023).

Mobilisasi massa di Indonesia menunjukkan pola berbeda karena sejarah protes yang panjang dan keberadaan masyarakat sipil yang kuat, dengan mahasiswa, serikat buruh, dan organisasi sosial sebagai aktor utama (Aspinall & Berenschot, 2020). Aksi kolektif banyak mengandalkan demonstrasi jalanan, kampanye publik, dan jaringan organisasi yang terstruktur, meskipun media sosial juga berperan dalam penyebaran informasi dan solidaritas digital (Aspinall & Berenschot, 2020). Namun, dinamika gerakan sering dipengaruhi oleh regulasi yang membatasi kebebasan berekspresi serta intervensi aparat, sehingga mobilisasi tidak berkembang secara spontan seperti di Sri Lanka (Nugroho, 2023). Perbandingan kedua negara menunjukkan bahwa strategi adaptif, seperti penggunaan ruang publik, optimalisasi media digital, dan diversifikasi taktik menghadapi represi negara menjadi kunci keberlanjutan mobilisasi dalam situasi politik dan sosial yang berbeda (Nugroho, 2023).

C. Bentuk dan Strategi Represi Negara

Represi negara memainkan peran penting dalam menentukan kekuatan atau kelemahan gerakan sosial karena negara menggunakan instrumen koersif maupun non-koersif untuk mempertahankan legitimasi politik (Davenport, 2021). Dalam kasus Sri Lanka, pemerintah menanggapi Gerakan Aragalaya dengan tindakan represif langsung seperti pembubaran paksa demonstrasi, intimidasi aktivis, dan pembatasan informasi melalui kontrol media serta pemblokiran komunikasi publik (Wickramasinghe, 2024). Selain kekerasan fisik, negara juga memakai strategi simbolik seperti membingkai gerakan sebagai ancaman stabilitas nasional untuk melemahkan dukungan publik. Pola ini menunjukkan bagaimana rezim otoriter-hibrida

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menggunakan kombinasi represi terbuka dan halus untuk meredam tekanan tanpa menanggung risiko kecaman internasional (Fernando & Samarasinghe, 2022).

Di Indonesia, represi negara berlangsung dalam bentuk yang lebih legalistik dan terstruktur melalui penggunaan undang-undang seperti UU ITE, aturan izin kerumunan, dan regulasi organisasi masyarakat untuk membatasi ruang gerak oposisi politik (Aspinall & Mietzner (2020). Selain itu, negara juga menggunakan stigmatisasi sebagai bentuk represi naratif dengan menandai gerakan masyarakat sipil sebagai anti-negara atau ditunggangi kepentingan asing, yang kemudian mengurangi legitimasi serta kapasitas mobilisasi. Meski kelompok masyarakat di kedua negara merespons dengan strategi adaptif seperti pembangunan jaringan solidaritas, kampanye digital, dan perlindungan hukum, represi negara tetap menimbulkan efek signifikan berupa ketakutan publik, fragmentasi gerakan, dan terbatasnya keberlanjutan mobilisasi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa represi merupakan variabel kunci yang membentuk hasil akhir gerakan sosial, baik dalam konteks rezim otoriter-hibrida seperti Sri Lanka maupun demokrasi prosedural seperti Indonesia.

D. Perbandingan Hasil Gerakan

Narasi krisis menjadi faktor penentu dalam keberhasilan gerakan sosial, sebagaimana terlihat pada Aragalaya di Sri Lanka, ketika krisis ekonomi ekstrem menciptakan urgensi publik dan memosisikan pemerintah sebagai aktor yang gagal sehingga mobilisasi publik berkembang menjadi tekanan politik yang berujung pada pengunduran diri Presiden Rajapaksa (Fernando, 2022). Berbeda dengan Sri Lanka, narasi krisis di Indonesia lebih terfragmentasi, karena isu kontemporer seperti penolakan UU Cipta Kerja tidak menghasilkan narasi struktural yang menyatukan sebagaimana pada Reformasi 1998, sehingga mobilisasi besar cenderung menghasilkan capaian terbatas (Aspinall & Mietzner, 2020). Perbedaan ini juga dipengaruhi kekuatan struktur mobilisasi, di mana Aragalaya mampu membangun jaringan horizontal lintas kelompok, sementara gerakan Indonesia kerap terfragmentasi dan sulit mempertahankan tekanan politik jangka panjang (Perera, 2023).

Selain faktor narasi dan struktur mobilisasi, tingkat represi negara turut menentukan hasil gerakan. Krisis yang melumpuhkan Sri Lanka melemahkan kapasitas negara dalam menegakkan represi secara efektif, sehingga mobilisasi tetap berkembang meskipun terdapat tindakan represif di tahap awal (Amnesty International Indonesia, 2023). Sebaliknya, Indonesia menunjukkan pola represi yang lebih stabil melalui instrumen hukum dan kontrol digital, yang membatasi ruang gerak masyarakat sipil dan memengaruhi

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

efektivitas mobilisasi. Dengan demikian, Aragalaya memperlihatkan bagaimana narasi krisis yang kuat, konsolidasi aktor, serta melemahnya represi dapat menghasilkan perubahan politik besar, sedangkan di Indonesia absennya narasi krisis yang menyatukan membuat hasil gerakan lebih bersifat sementara atau simbolik.

E. Studi Komparatif

Perbandingan antara Sri Lanka dan Indonesia menunjukkan bahwa krisis ekonomi di kedua negara menjadi pemicu utama munculnya gerakan sosial besar yang menuntut perubahan struktural (Daratullaila et al., 2025). Di Sri Lanka, krisis 2022 dipicu oleh kegagalan pengelolaan utang dan ketergantungan impor, sementara di Indonesia krisis 1998 mencerminkan kerentanan ekonomi terhadap pasar global (Simbolon, 2025). Kedua gerakan, Aragalaya di Sri Lanka dan Reformasi 1998 di Indonesia sama-sama merupakan ekspresi kemarahan publik terhadap korupsi dan ketidakadilan ekonomi (Rahayu et al., 2025). Perbedaan mencolok terletak pada pola mobilisasi: Aragalaya berkembang spontan memanfaatkan ruang digital, sedangkan Reformasi mengandalkan jaringan fisik mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil. Meski berbeda medium, keduanya memunculkan solidaritas lintas kelas dan generasi dalam menghadapi rezim yang dianggap tidak responsif (Nur et al., 2025).

Dalam hal respon negara, kedua pemerintah awalnya menempuh langkah represif, namun tekanan publik yang meningkat menyebabkan runtuhnya legitimasi politik hingga pemimpin masing-masing negara mengundurkan diri (Daratullaila et al., 2025). Pengalaman ini menunjukkan bahwa kegagalan pemerintah mengelola krisis dapat mempercepat delegitimasi rezim. Meskipun demikian, pasca-krisis kedua negara menghadapi tantangan besar dalam membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel (Stokke, 2024). Sri Lanka masih berjuang dalam restrukturisasi utang dan reformasi ekonomi, sementara Indonesia menghadapi persoalan korupsi dan kesenjangan sosial meski telah memasuki era demokrasi. Dengan demikian, keberhasilan gerakan sosial tidak hanya ditentukan oleh tumbangnya rezim, tetapi juga oleh kemampuan institusi pasca-krisis dalam menegakkan keadilan sosial dan stabilitas politik jangka panjang (Stokke, 2024).

KESIMPULAN

Studi perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan hasil gerakan sosial di Sri Lanka dan Indonesia dipengaruhi oleh kekuatan narasi krisis, pola mobilisasi, dan tingkat represi negara; krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2022 menciptakan narasi krisis yang kuat dan memicu

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

mobilisasi spontan lintas kelas yang akhirnya menumbangkan Presiden Rajapaksa, sedangkan di Indonesia narasi krisis lebih terfragmentasi dan mobilisasi yang terorganisir melalui jaringan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil sering terhambat oleh represi negara yang lebih halus melalui instrumen hukum dan stigmatisasi gerakan. Temuan ini menunjukkan bahwa krisis bukan hanya pemicu, tetapi juga arena perebutan makna yang membangun solidaritas publik, sementara bentuk represi menjadi penentu keberhasilan mobilisasi. Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur gerakan sosial dengan menekankan pentingnya konteks politik, budaya, dan teknologi, sementara secara praktis memberikan pelajaran bagi masyarakat sipil Indonesia untuk memperkuat strategi mobilisasi dan jaringan digital; penelitian lanjutan dapat menelaah dampak jangka panjang pascagerakan, seperti reformasi ekonomi Sri Lanka dan tantangan tata kelola di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2022). *Indonesia: Repression of Dissent Intensifies*. Amnesty International Report.

Amnesty International Indonesia. (2023). *Annual Human Rights Report: Shrinking Civic Space in Indonesia*.

Aspinall, E. (2020). Democratic resilience and political contestation in Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.

Aspinall, E., & Berenschot, W. (2020). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2020). Democratic regression in Indonesia: Law, rights, and the shrinking space of dissent. *Journal of Contemporary Asia*.

Aspinall, E., & Mietzner, M. (2020). Southeast Asia's Troubling Elections: Democratic Regression and Crisis Narratives. *Journal of Democracy*.

Daratullaila, D., Ndiva, S. T., Kurniawan, A., Audiyah, T., Ginting, L. I., & Saumi, F. (2025). Model regresi untuk menganalisis hubungan antara produksi pala dan produk domestik regional bruto Indonesia. *Jurnal Pendidikan Matematika Malikussaleh, 5(1),* 60–69.

Davenport, C. (2021). *State repression and political order*. Annual Review of Political Science.

Della Porta, D. (2020). *How Social Movements Win: Mobilization and Democratization*. Oxford University Press.

Fernando, S. (2024). *Digital activism and the making of Aragalaya movement*. Journal of Asian Comparative Politics.

Fernando, S., & Samarasinghe, G. (2022). *Hybrid authoritarianism and state strategies of control in Sri Lanka*. South Asian Review.

Fernando, S. (2022). *Economic Meltdown and the Rise of Aragalaya*. Sri Lanka Journal of Social Sciences.

Ginting, A. P. B., Deliana, E., & Diana, L. (2023). Peran Organisasi Moneter Internasional dalam Pemulihan Ekonomi Sri Lanka Perspektif Hukum Ekonomi Internasional. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9(16)*, 67–75. https://doi.org/10.5281/zenodo.8232143

Gunasekara, T. (2022). *Sri Lanka's economic collapse: Governance, corruption, and public dissent*. South Asia Journal.

Gunasekara, T. (2023). "The Aragalaya Protests and State Response in Sri Lanka." *Journal of Asian Studies*, 82(4), 712–730.

Hadiz, V. R. (2022). *Reform, oligarchy, and crisis narratives in contemporary Indonesia*. Pacific Review.

Kelegama, S., & Perera, N. (2023). *Understanding Sri Lanka's economic crisis: Structural roots and political accountability*. Journal of South Asian Development.

Mietzner, M. (2021). "Indonesia's Democratic Regression After 2019: Elite Consolidation and Shrinking Civic Space." *Contemporary Southeast Asia*, 43(1), 1–30.

Nur, P. A. R., Ginanjar, Y., & Akbar, T. H. (2025). Strategi India dalam Memperkuat Pengaruh di Asia Selatan Melalui Bantuan pada Krisis Sri Lanka Tahun 2022. *Global Insight Journal, 2(2)*. https://doi.org/10.36859/gij.v2i2.3321

Nugroho, Y. (2023). *Social media, youth, and protest mobilization in Indonesia*. Indonesian Journal of Communication Studies.

Nugroho, Y. (2023). *Digital contention and civil society resilience in Indonesia*. Indonesians Journal of Social Movement Studies.

Perera, M. (2023). *Repression and resistance in Sri Lanka's Aragalaya movement*. Journal of South Asian Human Rights.

Perera, H., & Samarasinghe, M. (2023). *Public space and collective identity in Sri Lanka's Aragalaya*. South Asian Social Review.

Perera, R. (2023). *Networks of Dissent: Collective Action in Sri Lanka's Aragalaya Movement*. Contemporary South Asia.

Power, T. (2020). "Jokowi's Second Term and Democratic Backsliding in Indonesia." *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269–298.

Rahayu, E. S. P. S., Sari, S., & Tholhah, T. (2025). Kepentingan Maladewa menerima Presiden Gotabaya Rajapaksa di tengah krisis ekonomi Sri Lanka. *Global Insights Journal: Jurnal Mahasiswa Hubungan Internasional, 2(1)*.

Ridwan, M., Nurhayati, D., Frassiska, Y. N., & Sudarwati, N. (2025). Perlukah posisi International Monetary Fund (IMF) mendukung pembangunan ekonomi di negara berkembang? *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, 13(1),* 33–45.

Simbolon, R. L., & Silaban, A. (2025). Analisis pengaruh rasio kesehatan finansial bank terhadap pertumbuhan kredit konsumsi di Indonesia tahun 2011–2023. *Journal of Analytical Research, Statistics and Computation, 4(2),* 49–63.

Stokke, K., & Kyaw, N. N. (2024). Revolutionary Resistance Against Full Autocratization: Actors and Strategies of Resistance After the 2021 Military Coup in Myanmar. *Political Geography, 108, 103011*. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.103011

Snow, D. (2020). *Handbook of Social Movements: Contemporary Perspectives*. Routledge.

Swartz, L. (2021). *Crisis as narrative: How societies frame disruption in the digital age*. Media & Society.

Tarrow, S. (2021). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics* (3rd ed.). Cambridge University Press.

Uyangoda, J. (2023). *People's Power and the Sri Lankan Crisis: Reflections on the Aragalaya Movement*. Colombo University Press.

Wickramasinghe, N. (2023). People's protest and the politics of solidarity in Sri Lanka. *Journal of South Asian Development*.

Wijenayake, S. (2023). "Fuel Shortages, Youth Mobilization, and the Fall of Rajapaksa." *Asian Politics & Policy*, 15(2), 233–250.